

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

### 1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
1. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

### 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022, terdiri dari :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

#### Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

1.

3.1. Laporan Operasional

2.

3.1. Neraca

3.

3.1. Laporan Perubahan Ekuitas

4.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

**BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

2.1.

**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
2.17.0.00.0.0 0.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2.17.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	PENDAPATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.000.000,00	6.010.000,00	10.000,00	100.1
	BELANJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.307.434.048,00	16.745.273.147,00	(562.160.901,00)	96.75
	BELANJA OPERASI	16.505.877.048,00	15.952.962.247,00	(552.914.801,00)	96.65
	BELANJA MODAL	801.557.000,00	792.310.900,00	(9.246.100,00)	98.84
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.260.985.268,00	10.976.233.487,00	(284.751.781,00)	97.47
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	75.156.000,00	74.341.000,00	(815.000,00)	98.91
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	152.192.700,00	143.590.192,00	(8.602.508,00)	94.34
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	178.775.500,00	176.724.472,00	(2.051.028,00)	98.85

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.267.190.400,00	1.183.391.200,00	(83.799.200,00)	93.38
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.358.850.800,00	1.292.122.280,00	(66.728.520,00)	95.08
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	341.064.080,00	335.144.380,00	(5.919.700,00)	98.26
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.673.219.300,00	2.563.726.136,00	(109.493.164,00)	95.90

## BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan.

#### 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	6.000.000,00	6.010.000,00	10.000,00	100,17	4.340.000,00
	PENDAPATAN DAERAH - LRA pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 memiliki Target sebesar Rp. 6.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.010.000,00 maka melebihi target sebesar Rp. 10.000,00 atau 100,17 %.					
	4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.000.000,00	6.010.000,00	10.000,00	100,17	4.340.000,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>4.340.000,00</b>
	4.1.02 Retribusi Daerah	6.000.000,00	6.010.000,00	10.000,00	100,17	4.340.000,00
4.1.02	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,17</b>	<b>4.340.000,00</b>
	- Retribusi Jasa Usaha	6.000.000,00	6.010.000,00	10.000,00	100,17	4.340.000,00

Target Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.010.000,00 atau 100,17 maka melebihi target sebesar Rp. 10.000,00

null

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.010.000,00 dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 4.340.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.670.000,00

Untuk Penerimaan mengalami kenaikan realisasi dari target jasa retribusi pada Tahun 2022 hal ini tak lepas dari usulan perubahan target penerimaan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar yang sebelumnya Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 6.000.000.

Rincian dan Penjelasan tentang Perubahan Anggaran Tahun 2022

1. Perubahan Realisasi Anggaran

Kode	Kategori	Anggaran 2022		Realisasi 2022	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	WILAYAH DAERAH	12.300.000.000	28.145.733.147	2.000.000.000	1.000.000.000

Perubahan ini disebabkan oleh perubahan target penerimaan jasa retribusi pada tahun 2022 yang semula Rp. 3.000.000,00 menjadi Rp. 6.000.000,00. Adapun perubahan anggaran ini merupakan bagian dari perubahan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

### BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3

1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

3.

1. Laporan Realisasi Anggaran

1.

Reff	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.307.434.048,00</b>	<b>16.745.273.147,00</b>	<b>(562.160.901,00)</b>	<b>96,75</b>	<b>15.695.032.579,00</b>

Belanja pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.17.307.434.048,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.16.745.273.147,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp. 15.695.032.579,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.050.240.568,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.505.877.048,00</b>	<b>15.952.962.247,00</b>	<b>(552.914.801,00)</b>	<b>96,65</b>	<b>15.332.163.879,00</b>
	5.1 BELANJA OPERASI	16.505.877.048,00	15.952.962.247,00	(552.914.801,00)	96,65	15.332.163.879,00
	5.2 BELANJA MODAL	801.557.000,00	792.310.900,00	(9.246.100,00)	98,85	362.868.700,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.505.877.048,00</b>	<b>15.952.962.247,00</b>	<b>(552.914.801,00)</b>	<b>96,65</b>	<b>15.332.163.879,00</b>
	5.1.01 Belanja Pegawai	8.265.793.785,00	8.127.972.488,00	(137.821.297,00)	98,33	9.004.763.252,00
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	8.240.083.263,00	7.824.989.759,00	(415.093.504,00)	94,96	6.327.400.627,00
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.265.793.785,00</b>	<b>8.127.972.488,00</b>	<b>(137.821.297,00)</b>	<b>98,33</b>	<b>9.004.763.252,00</b>

Belanja Pegawai pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 8.265.793.785,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.127.972.488,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.9.004.763.252,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 876.790.764,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.385.367.733,00	4.258.535.472,00	(126.832.261,00)	97,11	4.567.862.105,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.664.396.052,00	3.664.207.016,00	(189.036,00)	99,99	4.141.976.147,00

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	216.030.000,00	205.230.000,00	(10.800.000 ,00)	95,0 0	294.925.000,00
---	----------------	----------------	---------------------	-----------	----------------

<b>5.1.02 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.240.083.263,0 0</b>	<b>7.824.989.759,0 0</b>	<b>(415.093.5 04,00)</b>	<b>94,9 6</b>	<b>6.327.400.627 ,00</b>
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------

Belanja Barang dan Jasa pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 8.240.083.263,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.824.989.759,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.6.327.400.627,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.497.589.132,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.1.02.01 Belanja Barang	2.632.288.350,00	2.521.554.038,00	(110.734.31 2,00)	95,7 9	2.395.002.967, 00
5.1.02.02 Belanja Jasa	2.995.439.732,00	2.825.569.496,00	(169.870.23 6,00)	94,3 3	2.694.598.035, 00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	427.428.179,00	419.048.883,00	(8.379.296, 00)	98,0 4	80.218.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	2.164.927.002,00	2.048.817.342,00	(116.109.66 0,00)	94,6 4	1.157.581.625, 00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000 ,00)	50,0 0	0,00

<b>5.2 BELANJA MODAL</b>	<b>801.557.000,00</b>	<b>792.310.900,00</b>	<b>(9.246.100 ,00)</b>	<b>98,8 5</b>	<b>362.868.700,0 0</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	611.557.000,00	602.368.700,00	(9.188.300, 00)	98,5 0	362.868.700,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	189.942.200,00	(57.800,00)	99,9 7	0,00

<b>5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>611.557.000,00</b>	<b>602.368.700,00</b>	<b>(9.188.300 ,00)</b>	<b>98,5 0</b>	<b>362.868.700,0 0</b>
---	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 611.557.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 602.368.700,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.362.868.700,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 239.500.000,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00 )	90,0 0	0,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	313.470.100,00	312.044.700,00	(1.425.400,00)	99,5 5	352.368.700,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.420.000,00	27.420.000,00	0,00	100, 00	0,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium	10.782.500,00	10.750.000,00	(32.500,00)	99,7 0	0,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	255.884.400,00	248.554.000,00	(7.330.400,00)	97,1 4	10.500.000,00
<b>5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>189.942.200,00</b>	<b>(57.800,00 )</b>	<b>99,9 7</b>	<b>0,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 190.000.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 189.942.200,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 189.942.200,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung	190.000.000,00	189.942.200,00	(57.800,00)	99,9 7	0,00
---	----------------	----------------	-------------	-----------	------

**BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**3 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.**

**1 3.1.2. Laporan Operasional**

Reff	Uraian	Realisasi - LO	Realisasi - LO	Kenaikan		Realisasi -
		2022	2021	(Penurunan)	%	LRA 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>138,48</b>	<b>6.010.000,00</b>
	7.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	6.010.000,00	4.340.000,00	1.670.000,00	138,48	6.010.000,00
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>138,48</b>	<b>6.010.000,00</b>
	7.1.02 Retribusi Daerah-LO	6.010.000,00	4.340.000,00	1.670.000,00	138,48	6.010.000,00
7.1.02	<b>Retribusi Daerah-LO</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>138,48</b>	<b>6.010.000,00</b>

Retribusi Daerah-LO pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.010.000,00 dan realisasi Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.340.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.670.000,00 atau 138,48%. Jika Retribusi Daerah-LO pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.010.000,00 dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah-LO - LRA sebesar Rp. 6.010.000,00 persamaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 2022	6.010.000,00
a. Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	0,00
b. Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021	0,00
c. Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2022	0,00
d. Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2021	0,00
- Retribusi Daerah-LO 2022	6.010.000,00

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3  
1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

3.  
1. Laporan Operasional  
2.

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2022 (Rp)	Realisasi - LO 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2022 (Rp)
8	BEBAN DAERAH	16.514.502.369,00	15.856.906.768,13	657.595.600,87	104,15	0,00
	8.1 BEBAN OPERASI	16.514.502.369,00	15.856.906.768,13	657.595.600,87	104,15	0,00
8.1	BEBAN OPERASI	16.514.502.369,00	15.856.906.768,13	657.595.600,87	104,15	15.952.962.247,00
	8.1.01 Beban Pegawai	8.127.182.488,00	9.004.763.252,00	(877.580.764,00)	90,25	8.127.972.488,00
	8.1.02 Beban Barang dan Jasa	7.741.279.259,00	6.334.025.789,13	1.407.253.469,87	122,22	7.824.989.759,00
	8.1.08 Beban Penyusutan dan Amortisasi	646.040.622,00	518.117.727,00	127.922.895,00	124,69	0,00
8.1.01	Beban Pegawai	8.127.182.488,00	9.004.763.252,00	(877.580.764,00)	90,25	8.127.972.488,00
	Beban Pegawai pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.127.182.488,00 dan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 9.004.763.252,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 877.580.764,00 atau 90,25%. Jika Beban Pegawai pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.127.182.488,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 8.127.972.488,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -790.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :					
	Beban Pegawai - LRA 2022	8.127.972.488,00	0			
	Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset	-790.000,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2022	0,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2021	0,00				
	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00				

**Beban Pegawai 2022** 8.127.182.488,0  
0

**8.1.02 Beban Barang dan Jasa** 7.741.279.259,0 6.334.025.789,1 1.407.253.469,8 122, 7.824.989.759  
0 3 7 22 ,00

Beban Barang dan Jasa pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.741.279.259,00 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.334.025.789,13 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.407.253.469,87 atau 122,22%. Jika Beban Barang dan Jasa pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.741.279.259,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 7.824.989.759,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -83.710.500,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Beban Barang	2.536.806.638,00	2.395.195.967,00	141.610.671,00	94,4 2	2.521.554.038, 00
2	Beban Jasa	2.825.569.496,00	2.701.030.197,13	124.539.298,87	95,5 9	2.825.569.496, 00
3	Beban Pemeliharaan	320.085.783,00	80.218.000,00	239.867.783,00	25,0 6	419.048.883,00
4	Beban Perjalanan Dinas	2.048.817.342,00	1.157.581.625,00	891.235.717,00	56,5 0	2.048.817.342, 00
5	Beban Yang Akan Diserahkan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>1</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>2.536.806.638,00</b>	<b>2.395.195.967,00</b>	<b>141.610.671,00</b>	<b>94,4 2</b>	<b>2.521.554.038, 00</b>

Jika Beban Barang pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.536.806.638,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang - LRA sebesar Rp. 2.521.554.038,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. 15.252.600,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Beban Barang - LRA 2022</b>	<b>2.521.554.038,00</b>
a. Persediaan Tahun Anggaran 2022	-2.609.100,00
b. Persediaan Tahun Anggaran 2021	2.941.200,00
c. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
d. Belanja Persediaan yang menjadi Aset	0,00
e. Utang Persediaan 2022	0,00
f. Utang Persediaan 2021	0,00
g. Hibah dari Pihak Ketiga/Lainya	0,00
h. Persediaan dari BTT	0,00
i. Extracomptable	14.920.500,00



b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021	0,00
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset	0,00
d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset	-98.963.100,00
e. Pemeliharaan BTT	0,00

- **Beban Pemeliharaan - LO 2022** **320.085.783,00**

<b>4</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>2.048.817.342,0</b>	<b>1.157.581.625,0</b>	<b>891.235.717,00</b>	<b>56,5</b>	<b>2.048.817.342</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>,00</b>

Beban Perjalanan Dinas pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.048.817.342,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 2.048.817.342,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Perjalanan Dinas - LRA 2022** **2.048.817.342,0**  
**0**

a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00
b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
c. Perjalanan Dinas BTT	0,00

- **Beban Perjalanan Dinas - LO 2022** **2.048.817.342,0**  
**0**

<b>5</b>	<b>Beban Yang Akan Diserahkan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
----------	-----------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Jika Beban Yang Akan Diserahkan pada DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Yang Akan Diserahkan - LRA sebesar Rp. 10.000.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Yang Akan Diserahkan - LRA 2022** **10.000.000,00**

a. Beban Yang diakui Sebagai Aset	0,00
-----------------------------------	------

- **Beban Yang Akan Diserahkan - LO 2022** **10.000.000,00**

### BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3  
 . Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

#### 3.1.3 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	<b>ASET</b>	<b>8.220.656.113,00</b>	<b>7.990.182.435,00</b>
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :		
	1.1 Aset Lancar	2.609.100,00	2.941.200,00
	1.3 Aset Tetap	8.193.985.293,00	7.963.179.515,00
	1.4 Aset Lainnya	24.061.720,00	24.061.720,00
	Jumlah Aset	8.220.656.113,00	7.990.182.435,00
1.1	<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.609.100,00</b>	<b>2.941.200,00</b>
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :		
	1.1.7 Persediaan	2.609.100,00	2.941.200,00
	Jumlah Aset Lancar	2.609.100,00	2.941.200,00
1.1.1	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah.		
	1. Pendapatan Yang Belum Disetor		0,00

2. Uang Titipan 0,00

**1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan.

1. Sisa Kas UP/GU/TU 0,00

2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor 0,00

3. Uang Titipan 0,00

4. Jasa Giro 0,00

5. Kas Lainnya 0,00

**1.1.3 Piutang Pendapatan 0,00 0,00**

Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.

1 Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00

Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

2 Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00

Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian.

<b>1.1.4 Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------	-------------

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

1 Angsuran Rumah Dinas	0,00	0,00
2 Angsuran Kendaraan Dinas	0,00	0,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

<b>1.1.5 Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------	-------------

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi.

1 Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
----------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

2 Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.

- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

**1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00**

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan Sewa gedung)

1 Asuransi dibayar dimuka	0,00	0,00
2 Sewa gedung	0,00	0,00
Jumlah Beban dibayar dimuka	0,00	0,00

**1.1.7 Persediaan 2.609.100,00 2.941.200,00**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.

1 Persediaan Barang Pakai Habis	2.609.100,00	2.941.200,00
2 Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00

3 Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	2.609.100,00	2.941.200,00

**1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**1.3 Aset Tetap 8.193.985.293,00 7.963.179.515,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1.3.01 Tanah	765.710.960,00	764.254.060,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin	4.412.148.035,00	3.853.476.898,00
1.3.03 Gedung dan Bangunan	7.056.366.700,00	6.802.231.400,00
1.3.04 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.640.335.000,00	1.640.335.000,00
1.3.05 Aset Tetap Lainnya	48.000.000,00	48.000.000,00
1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan	188.966.000,00	188.966.000,00
1.3.07 Akumulasi Penyusutan	(5.917.541.402,00)	(5.334.083.843,00)
Jumlah Aset Tetap	8.193.985.293,00	7.963.179.515,00

**1.3.01 Tanah 765.710.960,00 764.254.060,00**

1 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021 764.254.060,00

2 Mutasi Bertambah 1.723.400,00

2.1 Realisasi Belanja Modal 0,00

2.2 Hibah

2.3 Beban

2.4 Mutasi Antar SKPD

Mutasi masuk biaya Pensertifikatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Hak Pakai No 96 Tahun 1989 / GS No 4977/1987 Jl. DR Sutomo No. 1 Pontianak 1.723.400,00

2.5 Reklas	
2.6 Revaluasi	
2.7 Koreksi	
2.8 Mutasi Nomenklatur	
3 Mutasi Berkurang	266.500,00

3.1 Hibah

3.2 Penghapusan

3.3 Mutasi Antar SKPD

Adanya Mutasi Keluar status

Penggunaan Barang Milik Daerah

berupa Tanah dari DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan BAST Tanah Bangunan

Rumah Negara Gol. III ke pada Badan

Kuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

266.500,00

3.4 Reklas

3.5 Revaluasi

3.6 Koreksi

3.7 Rusak Berat

3.8 Beban

3.9 Mutasi Nomenklatur

5 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember  
2022

765.710.960,00

**1.3.02 Peralatan dan Mesin**

**4.412.148.035,00**

**3.853.476.898,00**

1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31  
Desember 2021

3.853.476.898,00

2 Mutasi Bertambah

646.524.700,00

2.1 Realisasi Belanja Modal

602.368.700,00

2.2 Hibah

2.3 Beban

Jasa Pengadaan

790.000,00

2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
Reklas Sepeda Motor dari Aset Lain-Lain	17.366.000,00	
Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin	26.000.000,00	
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga		
2.9 Mutasi Nomenklatur		
3 Mutasi Berkurang	87.853.563,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
Reklas peralatan dan mesin ke Aset Lain-lain	72.933.063,00	
3.8 Beban		
3.9 Ekstracomtable		
Ekstaracomtable	14.920.500,00	
3.1.0 Mutasi Nomenklatur		
5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022	4.412.148.035,00	
<b>1.3.03 Gedung dan Bangunan</b>	<b>7.056.366.700,00</b>	<b>6.802.231.400,00</b>
1 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021	6.802.231.400,00	
2 Mutasi Bertambah	288.905.300,00	

2.1 Realisasi Belanja Modal	189.942.200,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
Belanja pemeliharaan diakui sebagai aset	98.963.100,00	
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga		
2.9 Mutasi Nomenklatur		
3 Mutasi Berkurang	34.770.000,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
Mutasi Keluar ke BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAST MUTASI PENGALIHAN STATUS Rumah Negara Golongan II Tipe B	8.770.000,00	
3.4 Reklas		
Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin	26.000.000,00	
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Beban		
3.9 Mutasi Nomenklatur		
5 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022	7.056.366.700,00	
<b>1.3.04 Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.640.335.000,00</b>	<b>1.640.335.000,00</b>

1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021	1.640.335.000,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
2.1	Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2	Hibah		
2.3	Beban		
2.4	Mutasi Antar SKPD		
2.5	Reklas		
2.6	Revaluasi		
2.7	Koreksi		
2.8	Mutasi Nomenklatur		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
3.1	Hibah		
3.2	Penghapusan		
3.3	Mutasi Antar SKPD		
3.4	Reklas		
3.5	Revaluasi		
3.6	Koreksi		
3.7	Rusak Berat		
3.8	Beban		
3.9	Mutasi Nomenklatur		
5	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022	1.640.335.000,00	
<b>1.3.05</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
1	Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021	48.000.000,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
2.1	Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2	Hibah		
2.3	Beban		

2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Mutasi Nomenklatur		
3 Mutasi Berkurang	0,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Beban		
3.9 Mutasi Nomenklatur		
5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022	48.000.000,00	
<b>1.3.06 Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>188.966.000,00</b>	<b>188.966.000,00</b>
1 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021	188.966.000,00	
2 Mutasi Bertambah	0,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Mutasi Nomenklatur		
3 Mutasi Berkurang	0,00	

3.1 Hibah	
3.2 Penghapusan	
3.3 Mutasi Antar SKPD	
3.4 Reklas	
3.5 Revaluasi	
3.6 Koreksi	
3.7 Rusak Berat	
3.8 Beban	
3.9 Mutasi Nomenklatur	
5 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022	188.966.000,00

**1.3.07 Akumulasi Penyusutan (5.917.541.402,00) (5.334.083.843,00)**

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut :

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.506.211.403,00)	(3.182.496.004,00)
- Per 31 Desember 2021	(3.182.496.004,00)	
- Koreksi	55.567.063,00	
a. Koreksi Bertambah	17.366.000,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	17.366.000,00	
Reklas Sepeda Motor dari Aset Lain-Lain Ke Peralatan dan Mesin	17.366.000,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	72.933.063,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	

6) Rusak Berat	72.933.063,00	
Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain dikarenakan Rusak Berat	72.933.063,00	
- Setelah Koreksi	(3.126.928.941,00)	
- Penyusutan tahun 2022	(379.282.462,00)	
- Per 31 Desember 2022	(3.506.211.403,00)	
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.706.815.312,00)	(1.541.361.680,00)
- Per 31 Desember 2021	(1.541.361.680,00)	
- Koreksi	7.016.000,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	7.016.000,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	7.016.000,00	
Mutasi Keluar ke BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAST MUTASI PENGALIHAN STATUS Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen tanggal 01-Sep-22 NO 943 /BKAD/2022	7.016.000,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	
- Setelah Koreksi	(1.534.345.680,00)	
- Penyusutan tahun 2022	(172.469.632,00)	
- Per 31 Desember 2022	(1.706.815.312,00)	
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(704.514.687,00)	(610.226.159,00)
- Per 31 Desember 2021	(610.226.159,00)	

- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	
- Setelah Koreksi	(610.226.159,00)	
- Penyusutan tahun 2022	(94.288.528,00)	
- Per 31 Desember 2022	(704.514.687,00)	
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2021	0,00	
- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	
2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
5) Penghapusan	0,00	
6) Rusak Berat	0,00	

- Setelah Koreksi	0,00
- Penyusutan tahun 2022	0,00
- Per 31 Desember 2022	0,00

**1.4 ASET LAINNYA 24.061.720,00 24.061.720,00**

Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1.4.4 Aset Lain-lain	24.061.720,00	24.061.720,00
Jumlah Aset Lainnya	24.061.720,00	24.061.720,00

**1.4.1 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00**

Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah

1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

**1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna

1 Sewa	0,00	0,00
2 Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
3 Bangun Guna Serah	0,00	0,00
4 Bangun Serah Guna	0,00	0,00

**1.4.3 Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00**

1 Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
- Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2021	0,00	
- Mutasi Bertambah	0,00	

1.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
1.2 Hibah		
1.3 Beban		
1.4 Mutasi Antar SKPD		
1.5 Reklas		
1.6 Revaluasi		
1.7 Koreksi		
1.71 Mutasi Nomenklatur		
- Mutasi Berkurang	0,00	
1.8 Hibah		
1.9 Penghapusan		
1.11 Mutasi Antar SKPD		
1.12 Reklas		
1.13 Revaluasi		
1.14 Koreksi		
1.15 Rusak Berat		
1.16 Beban		
1.18 Mutasi Nomenklatur		
- Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022	0,00	
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2021	0,00	
- Koreksi	0,00	
a. Koreksi Bertambah	0,00	
1) Hibah Masuk	0,00	
2) Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	
3) Reklas Antar Akun	0,00	
4) Koreksi	0,00	
b. Koreksi Berkurang	0,00	
1) Hibah Keluar	0,00	

2) Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00
3) Reklas Antar Akun	0,00
4) Koreksi	0,00
5) Penghapusan	0,00
6) Rusak Berat	0,00
- Setelah Koreksi	0,00
- Penyusutan tahun 2022	0,00
- Per 31 Desember 2022	0,00

**1.4.4 Aset Lain-lain 24.061.720,00 24.061.720,00**

1 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2021	24.061.720,00
2 Mutasi Bertambah	0,00
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00
2.2 Hibah	
2.3 Beban	
2.4 Mutasi Antar SKPD	
2.5 Reklas	
2.6 Revaluasi	
2.7 Koreksi	
2.8 Mutasi Nomenklatur	
3 Mutasi Berkurang	0,00
3.1 Hibah	
3.2 Penghapusan	
3.3 Mutasi Antar SKPD	
3.4 Reklas	
3.5 Revaluasi	
3.6 Koreksi	
3.7 Rusak Berat	
3.8 Beban	
3.9 Mutasi Nomenklatur	

5 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2022

24.061.720,00

<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1.1 Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	2.1.1.1 PPH21	0,00	
	2.1.1.2 PPH22	0,00	
	2.1.1.3 PPH23	0,00	
	2.1.1.4 PPH4	0,00	
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.2.1 PPN	0,00	
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	<b>2.2 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
	<b>2.3 Utang Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.1 Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
	2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan	0,00	
	2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS	0,00	
	2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	
	2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah	0,00	
	2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	

2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi	0,00	
2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS	0,00	
2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah	0,00	
2.3.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	
2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	
2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	
2.3.2.25 Belanja Barang dan Jada BLUD	0,00	
2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	
2.3.3 Utang Belanja Modal	0,00	0,00
2.3.3.1 Belanja Tanah	0,00	
2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin	0,00	
2.3.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	
2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
2.3.3.6 Belanja Aset Lainnya	0,00	
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00

**3 EKUITAS 8.220.656.113,00 7.990.182.435,00**

Pada Neraca per 31 Desember 2022 Ekuitas sebesar 8.220.656.113,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo Ekuitas sebesar 7.990.182.435,00

**TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 8.220.656.113,00 7.990.182.435,00**

### BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3

. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

#### 3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal	(114.552.936.401,88)
2 Surplus/ Defisit - LO	(16.508.492.369,00)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional	(15.862.451.747,00)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional	0,00
2.3 Pos Luar Biasa	0,00

#### 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

**3.1 Koreksi Nilai Persediaan** **0,00**

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

**3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap** **0,00**

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

**3.3 Lain - lain** **(297.100,00)**

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang	0,00
b. Koreksi Penyusutan	0,00
c. Hibah Keluar	0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD	1.723.400,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD	(2.020.500,00)
f. Penghapusan TPTGR	0,00
g. Perubahan Kode Rekening	0,00
h. Koreksi Tanah	0,00
i. Koreksi Utang Belanja	0,00

j. Reklass Antar Akun	0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00
n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00
o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan	0,00
q. Koreksi Persediaan	0,00
r. Koreksi Kas	0,00
s. Extracomptable	0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00
w. Koreksi Piutang	0,00
x. Koreksi Aset Lain Lain	0,00
y. Pelimpahan Masuk	0,00
z. Pelimpahan Keluar	0,00
<b>4 Ekuitas Akhir</b>	<b>(131.061.725.870,88)</b>

## BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 4.1 Gambaran Umum

Dalam pembangunan selalu ada perubahan baik yang digerakan secara langsung maupu tidak langsung dengan bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan perekonomian, sehingga bagi yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami penurunan dan kemunduran. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi yang pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan ekonomi menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari eksekutif, yudikatif maupun masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat di tanggulangi, namun satu hal yang lebih penting lagi adalah melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka diperlukan lembaga khusus yang menanganinya oleh karena itu dengan adanya perubahan nomenklatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah di bentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

### 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat di sebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan.

### 4.3 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sekretariat :Bagian Sekretariat membawahi :Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan Sub Bagian Keuangan dan Asset
2. Bidang Perizinan dan Kelembagaan membawahi: Seksi Perizinan dan Kelembagaan, dan Seksi Monitoring Evaluasi Pelaporan dan Data Koperasi.
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi: Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan Penerapan Sanksi
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi : Seksi Fasilitas, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM

Koperasi, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil membawahi : Seksi Fasilitas, Peningkatan Kualitas Usaha dan SDM Usaha Kecil, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4.4 Visi dan Misi

VISI :

" Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbakan Tata Kelola Pemerintahan "

MISI :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

4.5 Extracomptable	Tahun 2022	Tahun 2021
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
a. Persediaan Lain-lain	0,00	0,00
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
b. Aset Tetap	14.920.500,00	93.815.920,00

Pontianak, 30 Desember 2022  
PENGGUNA ANGGARAN

DRS. JUNAIDI, MM  
NIP. 19650809 198603 1 012

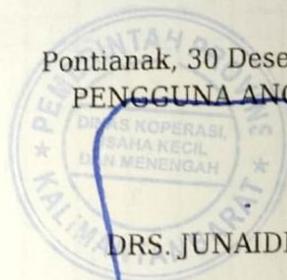
## BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022.

Pontianak, 30 Desember 2022  
PENGGUNA ANGGABAN



DRS. JUNAIDI, MM